

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PERIODE 2021-2023

Utami Mardlotillah¹; Annie Mustika Putri²; Linda Hetri Suriyanti³

Universitas Muhammadiyah Riau
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.88, Kp. Melayu, Kota Pekanbaru
E-mail : 190301078@student.umri.ac.id (Koresponding)

Abstract: This study analyzes the financial performance of village governments in Tambang District, Kampar Regency, from 2021 to 2023, using the "Value for Money" concept. The research employs a mixed-methods approach, beginning with a quantitative analysis of Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) realization reports from 17 villages, followed by in-depth qualitative interviews with village heads and financial officers to explain the quantitative findings. The results indicate that most villages demonstrate outstanding economic performance and very satisfactory effectiveness in revenue management, often exceeding targets. However, efficiency remains a significant challenge, with many villages categorized as "Less Efficient" or "Inefficient" due to spending often exceeding revenue. Key obstacles include external factors like the Covid-19 pandemic and regulatory changes and internal issues such as suboptimal project management and revenue fluctuations. The study concludes that strengthening realistic budget planning, improving project management, enhancing internal oversight, and increasing human resource capacity are crucial. This research contributes to public sector accounting by emphasizing the integration of economic efficiency and effectiveness indicators for accountable and transparent village financial governance, aligning with Stewardship Theory.

Keywords: *Financial Performance, Value for Money, APBDes, Economy, Efficiency, Effectiveness*

Organisasi pemerintah saat ini sedang dihadapi dengan berbagai masalah ekonomi dan hilangnya kepercayaan telah memberikan pengaruh negatif maupun positif terhadap usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Situasi ini telah mendorong terjadinya reformasi menyeluruh di berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat pemerintah merupakan entitas yang paling berpengaruh di Indonesia, perannya sangat krusial dalam pengembangan sektor publik. Sektor publik dapat diartikan sebagai penyedia layanan dan kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan umum tanpa mencari keuntungan finansial. Sektor ini menyediakan berbagai barang dan jasa. Saat ini, kinerja lembaga pemerintah menjadi fokus perhatian, terutama karena masyarakat semakin menyadari cara kerja administrasi publik. Banyak orang menilai bahwa

ketidakefisienan dalam organisasi sektor publik adalah bentuk pemborosan, penyebab kebocoran anggaran, dan merugikan institusi tersebut (Tjilen & Moento, 2023).

Sebagai konsekuensi dari sorotan terhadap kinerja lembaga pemerintah, salah satu tantangan krusial yang sedang dihadapi sektor pemerintahan adalah dalam penyusunan laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan penemuan beberapa kesalahan dalam proses audit laporan keuangan pemerintah desa yang menyebabkan ketidakefektifan pengelolaan keuangan desaterkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset termasuk regulasi penatausahaan. Selain itu ditemukan inventarisasi belum dimanfaatkan, hingga belum tersedianya petunjuk teknis atau juknis pengawasan pengelolaan keuangan desa yang

komprehensif maupun tematik (<https://economy.okezone.com>)

Ketidakjelasan dan penyusunan laporan keuangan yang kurang efektif dan efisien ini menyebabkan masyarakat merasa tidak jelas apakah dana yang diinvestasikan sebanding dengan manfaat yang diperoleh program kerja yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Harapan masyarakat terhadap organisasi pemerintah perlahan menurun akibat ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas informasi keuangan. Oleh karena itu, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang baik, sektor publik terus berkembang, memberikan dorongan terhadap pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat akuntabilitas publik (Aldi et al., 2024).

Pentingnya akuntabilitas dan efisiensi ini semakin relevan dengan adanya otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 yang menjadi dasar bagi UU No 22 Tahun 1999, dan kemudian direvisi menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No 3 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Desa. Ketetapan ini mencerminkan komitmen dan pengakuan pemerintah terhadap otonomi desa, memberikan kewenangan kepada desa untuk merumuskan kebijakan, khususnya dalam hal pelayanan, peningkatan partisipasi, inisiatif, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan, sesuai dengan ketentuan dalam UU No 3 Tahun 2024. Meskipun undang-undang ini diharapkan membawa banyak manfaat positif, ada juga kekhawatiran bahwa hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan jika pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak menghadapinya dengan baik. Pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pengembangan otonomi daerah (Intan et al., 2021).

Menurut Romadhan (2024), menyatakan bahwa, salah satu cara dalam mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan

dan pengelolaan keuangan negara ialah dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Pengukuran kinerja yang diterapkan oleh organisasi sektor publik selama ini cenderung menggunakan pendekatan pengukuran kinerja yang bersifat tradisional. Menurut Mardiasmo (2018), Tujuan dari pengukuran kinerja menggunakan pendekatan *Value for Money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintahan, yang diukur melalui indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Aspek ekonomis berkaitan dengan perolehan *input* yang memiliki kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah, yang diukur melalui perbandingan nilai *input* dalam satuan moneter. Sementara itu, Efisiensi merujuk pada kemampuan untuk mencapai hasil maksimal dengan memanfaatkan sejumlah *input* tertentu, di mana efisiensi diukur dengan membandingkan *output* dan *input* sesuai dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Terakhir, efektivitas mengukur sejauh mana hasil program mencapai target yang ditentukan, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai perbandingan antara *outcome* dan *output*.

Namun demikian, meskipun pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan alat evaluasi seperti *Value for Money*, realitas di lapangan menunjukkan adanya permasalahan. Menurut hasil laporan statistik keuangan pemerintah desa tahun 2023 dan 2024 yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia ditemukan beberapa permasalahan keuangan yang mencakup beberapa isu utama yaitu meliputi ketidakcocokan antara anggaran dan realisasi pendapatan, yang sering kali disebabkan oleh ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, banyak desa menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran yang efisien, sehingga belanja tidak selalu tepat sasaran. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu hambatan yang signifikan. Akibatnya, transparansi dan

akuntabilitas dalam penggunaan dana menjadi rendah, yang pada akhirnya dapat menghalangi proses pembangunan dan pengembangan desa secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola keuangan desa, serta penerapan sistem yang lebih baik dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Permasalahan serupa juga teridentifikasi di tingkat provinsi. Berdasarkan hasil laporan statistik keuangan pemerintahan desa provinsi Riau ditemukan beberapa kecamatan yang mengalami permasalahan keuangan signifikan yaitu Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar, dan Kecamatan Siak Hulu, di mana pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan masih memerlukan perbaikan. Hal ini berdampak pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang esensial bagi masyarakat, sehingga perlu adanya perhatian dan intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024).

Tambang adalah salah satu kecamatan di kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Secara administratif kecamatan Tambang terdiri dari 17 desa. Dan Rimbo Panjang merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Tambang, berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rimbo Panjang terdiri dari komponen berikut:

Tabel 1.
Laporan Realisasi APBDes Desa Rimbo Panjang Tahun 2021-2023

| Tahun | TOTAL | | | |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Pendapatan | | Belanja | |
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 2021 | Rp2,448,902,317 | Rp2,448,902,317 | Rp2,608,385,867 | Rp2,529,771,867 |
| 2022 | Rp2,279,134,896 | Rp2,104,189,672 | Rp2,307,748,896 | Rp2,115,397,300 |
| 2023 | Rp2,411,137,129 | Rp2,456,891,083 | Rp2,378,408,763 | Rp2,356,904,800 |

Sumber : Pemerintahan Desa Rimbo Panjang, data diolah oleh penulis tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dapat diuraikan bahwa APBDes Desa Rimbo Panjang mulai tahun 2021, 2022 dan

2023 anggaran pendapatan dan belanja mengalami kenaikan diikuti dengan realisasinya. Namun, terdapat kejanggalaan signifikan pada tahun 2022, dimana realisasi belanja lebih rendah dari anggaran, dan di tahun 2023, realisasi pendapatan lebih tinggi daripada anggaran. Fenomena ini mengindikasikan bahwa dana yang dialokasikan berpotensi tidak digunakan sesuai dengan rencana awal, atau terdapat ketidakakuratan dalam perencanaan anggaran. Kesalahan tersebut berpotensi merugikan desa dalam jangka panjang dan berdampak pada kinerja keuangan desa. Dalam hal ini, defisit anggaran dapat dikaitkan dengan adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan. Kejanggalaan ini menjadi pemicu utama untuk menganalisis lebih dalam kinerja keuangan desa menggunakan pendekatan *Value for Money*.

Berdasarkan keadaan ini, peneliti akan menyelidiki kinerja keuangan pemerintah desa pada kecamatan Tambang melalui pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dengan judul penelitian “Analisis *Value for Money* Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Kecamatan Tambang Periode 2021-2023”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan *mix method* (campuran) yaitu metode penelitian yang menggabungkan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Penelitian ini menggunakan desain Sekuensial Eksplanatoris (*explanatory sequential design*) dalam desain metode campuran. Desain sekuensial eksplanatoris dimulai dengan peneliti pertama-tama mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif, kemudian menggunakan hasil tersebut untuk merancang dan mengumpulkan data kualitatif.

HASIL

Pengukuran Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis yaitu tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk melakukan suatu pelayanan publik. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggarannya (Mardiasmo, 2018). Semakin besar rasio berarti semakin tinggi nilai ekonomi. Rasio ekonomis dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan Pemerintahan Desa Kecamatan Tambang Periode 2021-2023, menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2. Hasil perhitungan rasio ekonomis untuk Pemerintahan Desa Kecamatan Tambang periode 2021-2023

| No | Nama Desa | Tahun | Laporan Belanja | | Presentase | Kriteria |
|----|---------------|-------|---------------------|---------------------|------------|----------------|
| | | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | Tambang | 2021 | Rp 1.783.871.289,00 | Rp 1.748.671.289,00 | 98% | Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 1.771.123.732,00 | Rp 1.718.592.415,00 | 97% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 1.865.470.120,00 | Rp 1.843.042.762,00 | 99% | Ekonomis |
| 2 | Kuaupan | 2021 | Rp 1.578.541.280,00 | Rp 1.540.989.780,00 | 98% | Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 1.669.783.517,00 | Rp 1.589.307.052,00 | 95% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 1.784.623.841,00 | Rp 1.784.623.841,00 | 100% | Ekonomis |
| 3 | Gobah | 2021 | Rp 1.629.182.427,00 | Rp 1.602.800.168,00 | 98% | Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 1.522.516.706,00 | Rp 1.473.039.444,00 | 97% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 2.005.222.517,00 | Rp 1.994.278.471,00 | 99% | Ekonomis |
| 4 | Teluk Kenidai | 2021 | Rp 1.648.233.875,00 | Rp 1.382.193.821,00 | 84% | Cukup Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 1.711.539.811,00 | Rp 1.603.874.081,00 | 94% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 1.546.216.548,00 | Rp 1.465.342.448,00 | 95% | Ekonomis |
| 5 | Aur Sati | 2021 | Rp 1.542.638.401,00 | Rp 1.501.589.400,00 | 97% | Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 1.841.249.595,00 | Rp 1.806.365.607,00 | 98% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 1.698.212.505,00 | Rp 1.696.661.363,00 | 100% | Ekonomis |
| 6 | Padang Luas | 2021 | Rp 1.428.612.339,00 | Rp 1.401.563.600,00 | 98% | Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 1.509.661.535,00 | Rp 1.443.833.500,00 | 96% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 1.843.031.847,00 | Rp 1.796.518.000,00 | 97% | Ekonomis |
| 7 | Terantang | 2021 | Rp 2.103.615.766,00 | Rp 1.874.897.454,00 | 89% | Cukup Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 1.840.821.167,00 | Rp 1.774.790.700,00 | 96% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 1.925.771.411,00 | Rp 1.845.238.200,00 | 96% | Ekonomis |
| 8 | Kualu | 2021 | Rp 2.708.628.050,00 | Rp 2.677.230.718,00 | 99% | Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 2.868.162.867,00 | Rp 2.638.588.499,00 | 92% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 2.926.226.556,00 | Rp 2.774.767.500,00 | 95% | Ekonomis |
| 9 | Rimbo Panjang | 2021 | Rp 2.608.385.867,00 | Rp 2.529.771.867,00 | 97% | Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 2.307.748.896,00 | Rp 2.115.397.300,00 | 92% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 2.378.408.763,00 | Rp 2.356.904.800,00 | 99% | Ekonomis |
| 10 | Parit Baru | 2021 | Rp 1.702.332.971,00 | Rp 1.466.078.750,00 | 86% | Cukup Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 1.716.645.495,00 | Rp 1.691.145.436,00 | 99% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 1.608.719.393,00 | Rp 1.572.526.562,00 | 98% | Ekonomis |
| 11 | Kemang Indah | 2021 | Rp 1.264.707.223,00 | Rp 1.177.209.970,00 | 93% | Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 1.498.881.090,00 | Rp 1.470.645.258,00 | 98% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 1.561.415.273,00 | Rp 1.559.840.174,00 | 100% | Ekonomis |
| 12 | Kualu Nenas | 2021 | Rp 1.749.911.224,00 | Rp 1.747.153.322,00 | 100% | Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 1.654.609.203,00 | Rp 1.579.134.293,00 | 95% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 2.308.322.934,00 | Rp 2.285.728.052,00 | 99% | Ekonomis |
| 13 | Tarai Bangun | 2021 | Rp 2.889.140.897,00 | Rp 2.870.560.144,00 | 99% | Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 2.427.082.163,00 | Rp 2.251.608.100,00 | 93% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 2.972.910.919,00 | Rp 2.848.067.100,00 | 96% | Ekonomis |
| 14 | Sungai Pinang | 2021 | Rp 1.814.443.468,00 | Rp 1.814.443.468,00 | 100% | Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 2.356.705.103,00 | Rp 2.210.645.568,00 | 94% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 2.146.989.312,00 | Rp 2.143.939.282,00 | 100% | Ekonomis |
| 15 | Balam Jaya | 2021 | Rp 1.265.037.746,00 | Rp 1.255.237.746,00 | 99% | Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 1.231.225.944,00 | Rp 1.203.696.700,00 | 98% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 1.406.749.500,00 | Rp 1.406.749.500,00 | 100% | Ekonomis |
| 16 | Pulau Permai | 2021 | Rp 1.311.753.345,00 | Rp 1.142.156.105,00 | 87% | Cukup Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 1.928.784.930,00 | Rp 1.855.574.755,00 | 96% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 1.600.261.489,00 | Rp 1.596.499.146,00 | 100% | Ekonomis |
| 17 | Palung Raya | 2021 | Rp 1.483.960.868,00 | Rp 1.483.960.868,00 | 100% | Ekonomis |
| | | 2022 | Rp 1.280.765.892,00 | Rp 1.260.907.979,00 | 98% | Ekonomis |
| | | 2023 | Rp 1.649.167.373,00 | Rp 1.649.027.327,00 | 100% | Ekonomis |

Sumber : Data diolah oleh penulis tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, data yang disajikan mencakup laporan belanja anggaran dari 17 desa selama periode 2021 hingga 2023, yang menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang bervariasi. Sebagian besar desa berhasil mencapai persentase realisasi belanja yang tinggi, dengan banyak di antaranya mencatat angka antara 95% hingga 100%, yang mengindikasikan pengelolaan anggaran yang ekonomis. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi dalam *Value for Money* yang menekankan pada perolehan input dengan biaya terendah (Mardiasmo, 2018).

Pada tahun 2021, beberapa desa seperti Teluk Kenidai (84%), Tambang (89%), Parit Baru (86%), dan Pulau Permai (87%) menunjukkan persentase di bawah 90%, sehingga tergolong dalam kategori "Cukup Ekonomis". Ini berarti ada ruang untuk peningkatan dalam efisiensi pengeluaran di desa-desa tersebut. Kriteria ekonomis yang diterapkan (Kepmendagri No.600.900.327 tahun 2019) menunjukkan bahwa 13 dari 17 desa tergolong dalam kategori "Ekonomis" atau "Cukup Ekonomis" pada tahun 2021. Tren tahun ke tahun menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran, dengan beberapa desa, seperti Kualu Nenas, Sungai Pinang, Balam Jaya, dan Palung Raya, mencapai 100% realisasi anggaran pada beberapa tahun, menandakan ekonomis yang sangat baik.

Pengukuran Efisien

Efisiensi yaitu pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu (Mardiasmo, 2018). Efisiensi merupakan perbandingan *output/ input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Berikut perhitungan dan kriteria rasio efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintahan Desa Kecamatan Tambang Periode 2021-2023:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3. Hasil Rasio Efisiensi Pemerintahan Desa Kecamatan Tambang Periode 2021-2023

| No | Nama Desa | Tahun | Laporan Realisasi | | Presentase | Kriteria |
|----|---------------|-------|--------------------|--------------------|------------|----------------|
| | | | Pendapatan | Belanja | | |
| 1 | Terantang | 2021 | Rp1.738.551.289,00 | Rp1.748.671.289,00 | 101% | Tidak Efisien |
| | | 2022 | Rp1.783.868.847,00 | Rp1.718.592.415,00 | 96% | Kurang Efisien |
| | | 2023 | Rp1.833.523.054,00 | Rp1.843.042.762,00 | 101% | Tidak Efisien |
| 2 | Kuaupan | 2021 | Rp1.599.041.280,00 | Rp1.540.989.780,00 | 96% | Kurang Efisien |
| | | 2022 | Rp1.737.192.490,00 | Rp1.589.307.052,00 | 91% | Kurang Efisien |
| | | 2023 | Rp1.807.610.314,00 | Rp1.784.623.841,00 | 99% | Kurang Efisien |
| 3 | Gobah | 2021 | Rp1.618.682.851,00 | Rp1.602.800.168,00 | 99% | Kurang Efisien |
| | | 2022 | Rp1.455.161.724,00 | Rp1.473.039.444,00 | 101% | Tidak Efisien |
| | | 2023 | Rp1.972.326.367,00 | Rp1.994.278.471,00 | 101% | Tidak Efisien |
| 4 | Teluk Kenidai | 2021 | Rp1.534.228.601,00 | Rp1.382.193.821,00 | 90% | Cukup Efisien |
| | | 2022 | Rp1.622.106.472,00 | Rp1.603.874.081,00 | 99% | Kurang Efisien |
| | | 2023 | Rp1.563.041.016,00 | Rp1.465.342.448,00 | 94% | Kurang Efisien |
| 5 | Aur Sati | 2021 | Rp1.538.388.400,00 | Rp1.501.589.400,00 | 98% | Kurang Efisien |
| | | 2022 | Rp1.834.986.347,00 | Rp1.806.365.607,00 | 98% | Kurang Efisien |
| | | 2023 | Rp1.682.331.623,00 | Rp1.696.661.363,00 | 101% | Tidak Efisien |
| 6 | Padang Luas | 2021 | Rp1.362.781.169,00 | Rp1.401.563.600,00 | 103% | Tidak Efisien |
| | | 2022 | Rp1.478.233.081,00 | Rp1.443.833.500,00 | 98% | Kurang Efisien |
| | | 2023 | Rp1.783.415.240,00 | Rp1.796.518.000,00 | 101% | Tidak Efisien |
| 7 | Tambang | 2021 | Rp2.035.104.784,00 | Rp1.874.897.454,00 | 92% | Kurang Efisien |
| | | 2022 | Rp1.699.471.002,00 | Rp1.774.790.700,00 | 104% | Tidak Efisien |
| | | 2023 | Rp1.857.569.690,00 | Rp1.845.238.200,00 | 98% | Kurang Efisien |
| 8 | Kualu | 2021 | Rp2.691.584.486,00 | Rp2.677.230.718,00 | 99% | Kurang Efisien |
| | | 2022 | Rp2.766.563.456,00 | Rp2.638.588.499,00 | 95% | Kurang Efisien |
| | | 2023 | Rp2.833.069.285,00 | Rp2.774.767.500,00 | 98% | Kurang Efisien |
| 9 | Rimbo Panjang | 2021 | Rp2.448.902.317,00 | Rp2.529.771.867,00 | 103% | Tidak Efisien |
| | | 2022 | Rp2.104.189.672,00 | Rp2.115.397.300,00 | 101% | Tidak Efisien |
| | | 2023 | Rp2.456.891.083,00 | Rp2.356.904.800,00 | 96% | Kurang Efisien |
| 10 | Parit Baru | 2021 | Rp1.577.571.547,00 | Rp1.466.078.750,00 | 93% | Kurang Efisien |
| | | 2022 | Rp1.534.523.473,00 | Rp1.691.145.436,00 | 110% | Tidak Efisien |
| | | 2023 | Rp1.612.292.705,00 | Rp1.572.526.562,00 | 98% | Kurang Efisien |
| 11 | Kemang Indah | 2021 | Rp1.358.924.068,00 | Rp1.177.209.970,00 | 87% | Cukup Efisien |
| | | 2022 | Rp1.492.783.202,00 | Rp1.470.645.258,00 | 99% | Kurang Efisien |
| | | 2023 | Rp1.548.114.132,00 | Rp1.559.840.174,00 | 101% | Tidak Efisien |
| 12 | Kualu Nenas | 2021 | Rp1.530.620.222,00 | Rp1.747.153.322,00 | 114% | Tidak Efisien |
| | | 2022 | Rp1.676.354.557,00 | Rp1.579.134.293,00 | 94% | Kurang Efisien |
| | | 2023 | Rp2.311.153.388,00 | Rp2.285.728.052,00 | 99% | Kurang Efisien |
| 13 | Tarai Bangun | 2021 | Rp2.723.619.194,00 | Rp2.870.560.144,00 | 105% | Tidak Efisien |
| | | 2022 | Rp2.410.921.602,00 | Rp2.251.608.100,00 | 93% | Kurang Efisien |
| | | 2023 | Rp2.901.957.419,00 | Rp2.848.067.100,00 | 98% | Kurang Efisien |
| 14 | Sungai Pinang | 2021 | Rp2.014.443.468,00 | Rp1.814.443.468,00 | 90% | Cukup Efisien |
| | | 2022 | Rp1.261.117.307,00 | Rp1.203.696.700,00 | 95% | Kurang Efisien |
| | | 2023 | Rp2.138.042.597,00 | Rp2.143.939.282,00 | 100% | Kurang Efisien |
| 15 | Balam Jaya | 2021 | Rp1.289.146.114,00 | Rp1.255.237.746,00 | 97% | Kurang Efisien |
| | | 2022 | Rp1.261.117.307,00 | Rp1.203.696.700,00 | 95% | Kurang Efisien |
| | | 2023 | Rp1.484.665.880,00 | Rp1.406.749.500,00 | 95% | Kurang Efisien |
| 16 | Pulau Permai | 2021 | Rp1.372.753.345,00 | Rp1.142.156.105,00 | 83% | Cukup Efisien |
| | | 2022 | Rp1.794.113.073,00 | Rp1.855.574.755,00 | 103% | Tidak Efisien |
| | | 2023 | Rp1.543.852.828,00 | Rp1.596.499.146,00 | 103% | Tidak Efisien |
| 17 | Palung Raya | 2021 | Rp1.516.784.868,00 | Rp1.483.960.868,00 | 98% | Kurang Efisien |
| | | 2022 | Rp1.315.392.726,00 | Rp1.260.907.979,00 | 96% | Kurang Efisien |
| | | 2023 | Rp1.645.349.547,00 | Rp1.649.027.327,00 | 100% | Kurang Efisien |

Berdasarkan data pada Tabel 4.5, kinerja efisiensi pengelolaan anggaran di desa-desa Kecamatan Tambang selama periode 2021-2023 menunjukkan tantangan yang signifikan. Banyak desa tergolong dalam kategori "Kurang Efisien" atau bahkan "Tidak Efisien", yang berarti realisasi belanja mereka seringkali melebihi atau mendekati realisasi pendapatan, atau tidak mencapai output yang optimal dengan input yang ada.

Pada tahun 2021, Desa Terantang mencatat rasio efisiensi 101%, yang dikategorikan "Tidak Efisien", karena realisasi belanja sedikit lebih tinggi dari

realisasi pendapatan. Hal serupa terjadi pada Desa Padang Luas (103%), Rimbo Panjang (103%), Kualu Nenas (114%), dan Tarai Bangun (105%), yang semuanya menunjukkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana. Desa-desa ini mengeluarkan lebih banyak dari yang mereka terima, yang dapat mengindikasikan defisit anggaran atau penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, beberapa desa masih menghadapi masalah efisiensi. Desa Tambang, misalnya, mencatat rasio 104% ("Tidak Efisien"), dan Parit Baru mencapai 110% ("Tidak Efisien"). Ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya masih berlanjut atau bahkan memburuk di beberapa desa. Pada tahun 2023, meskipun ada perbaikan di beberapa desa, masalah efisiensi masih terlihat. Desa Terantang (101%), Gobah (101%), Aur Sati (101%), Padang Luas (101%), Kemang Indah (101%), dan Pulau Permai (103%) masih berada dalam kategori "Tidak Efisien". Hanya beberapa desa yang menunjukkan kinerja "Cukup Efisien", seperti Teluk Kenidai (90% di 2021) dan Sungai Pinang (90% di 2021).

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar desa mengalami kesulitan dalam mencapai efisiensi yang optimal dalam pengelolaan anggaran. Realisasi belanja yang seringkali melebihi realisasi pendapatan menunjukkan adanya tekanan finansial atau kurangnya perencanaan yang matang dalam alokasi sumber daya. Hal ini sejalan dengan permasalahan yang diidentifikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2024) mengenai pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan yang masih memerlukan perbaikan di Kecamatan Tambang.

Kendala dalam mencapai efisiensi ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, seperti yang diungkapkan dalam wawancara sebelumnya, yaitu adanya kegiatan yang tidak terealisasi, pekerjaan yang belum selesai dibayar, ketersediaan dana yang tidak

cukup, dan perubahan regulasi akibat kondisi luar biasa seperti pandemi. Ketika realisasi pendapatan menurun atau program tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, hal ini secara langsung mempengaruhi rasio efisiensi.

Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah desa perlu fokus pada perencanaan anggaran yang lebih realistis, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan, dan adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa juga krusial, sebagaimana disarankan oleh Badan Pusat Statistik (2024). Dengan demikian, dana yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif untuk mencapai hasil yang maksimal dengan input yang minimal, sesuai dengan prinsip efisiensi dalam *Value for Money*.

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, efektivitas mengukur sejauh mana target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* (realisasi pendapatan) dengan *output* (anggaran pendapatan) (Mardiasmo, 2018). Rasio efektivitas dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4. Hasil Rasio Efektivitas Pemerintahan Desa Kecamatan Tambang Periode 2021-2023:

| No | Nama Desa | Tahun | Laporan Pendapatan | | Presentase | Kriteria |
|----|---------------|-------|----------------------|----------------------|------------|----------------|
| | | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | Tambang | 2021 | Rp. 1.769.501.289.00 | Rp. 1.738.551.289.00 | 98% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 1.821.463.752.00 | Rp. 1.783.868.847.00 | 98% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 1.855.950.412.00 | Rp. 1.833.523.054.00 | 99% | Efektif |
| 2 | Kuapan | 2021 | Rp. 1.599.041.280.00 | Rp. 1.599.041.280.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 1.754.783.517.00 | Rp. 1.737.192.490.00 | 99% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 1.807.610.314.00 | Rp. 1.807.610.314.00 | 100% | Efektif |
| 3 | Gobah | 2021 | Rp. 1.618.682.427.00 | Rp. 1.618.682.851.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 1.470.748.685.00 | Rp. 1.455.161.724.00 | 99% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 1.959.598.136.00 | Rp. 1.972.326.367.00 | 101% | Sangat Efektif |
| 4 | Teluk Kenidai | 2021 | Rp. 1.534.228.601.00 | Rp. 1.534.228.601.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 1.650.917.340.00 | Rp. 1.622.106.472.00 | 98% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 1.564.097.112.00 | Rp. 1.563.041.016.00 | 100% | Efektif |
| 5 | Aur Sati | 2021 | Rp. 1.538.388.401.00 | Rp. 1.538.388.400.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 1.850.540.595.00 | Rp. 1.834.986.347.00 | 99% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 1.683.882.765.00 | Rp. 1.682.331.623.00 | 100% | Efektif |
| 6 | Padang Luas | 2021 | Rp. 1.362.781.171.00 | Rp. 1.362.781.169.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 1.493.952.798.00 | Rp. 1.478.233.081.00 | 99% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 1.786.583.529.00 | Rp. 1.783.415.240.00 | 100% | Efektif |
| 7 | Terantang | 2021 | Rp. 2.145.104.784.00 | Rp. 2.035.104.784.00 | 95% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 1.714.787.855.00 | Rp. 1.699.471.002.00 | 99% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 1.880.058.099.00 | Rp. 1.875.569.690.00 | 100% | Efektif |
| 8 | Kualu | 2021 | Rp. 2.691.584.892.00 | Rp. 2.691.584.886.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 2.902.105.939.00 | Rp. 2.766.563.456.00 | 95% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 2.837.194.662.00 | Rp. 2.833.069.285.00 | 100% | Efektif |
| 9 | Rimbo Panjang | 2021 | Rp. 2.448.902.317.00 | Rp. 2.448.902.317.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 2.279.134.896.00 | Rp. 2.104.189.672.00 | 92% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 2.411.137.129.00 | Rp. 2.456.891.083.00 | 102% | Sangat Efektif |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|----------------------|----------------------|------|---------|
| 10 | Parit Baru | 2021 | Rp. 1.577.571.547.00 | Rp. 1.577.571.547.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 1.549.838.295.00 | Rp. 1.534.523.473.00 | 99% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 1.613.719.391.00 | Rp. 1.612.292.705.00 | 100% | Efektif |
| 11 | Kemang Indah | 2021 | Rp. 1.359.297.223.00 | Rp. 1.358.924.068.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 1.508.456.992.00 | Rp. 1.492.783.202.00 | 99% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 1.549.203.231.00 | Rp. 1.548.114.132.00 | 100% | Efektif |
| 12 | Kualu Nemas | 2021 | Rp. 1.530.620.224.00 | Rp. 1.530.620.222.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 1.696.851.303.00 | Rp. 1.676.354.557.00 | 99% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 2.315.344.770.00 | Rp. 2.311.153.388.00 | 100% | Efektif |
| 13 | Tarai Bangun | 2021 | Rp. 2.723.619.194.00 | Rp. 2.723.619.194.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 2.499.501.535.00 | Rp. 2.410.921.602.00 | 96% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 2.906.016.789.00 | Rp. 2.901.957.419.00 | 100% | Efektif |
| 14 | Sungai Pinang | 2021 | Rp. 2.014.443.468.00 | Rp. 2.014.443.468.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 2.566.705.103.00 | Rp. 2.431.552.751.00 | 95% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 2.141.078.874.00 | Rp. 2.138.042.597.00 | 100% | Efektif |
| 15 | Balam Jaya | 2021 | Rp. 1.289.146.114.00 | Rp. 1.289.146.114.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 1.276.425.944.00 | Rp. 1.261.117.307.00 | 99% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 1.484.665.880.00 | Rp. 1.484.665.880.00 | 100% | Efektif |
| 16 | Pulau Permai | 2021 | Rp. 1.372.753.345.00 | Rp. 1.372.753.345.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 1.809.526.930.00 | Rp. 1.794.113.073.00 | 99% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 1.547.615.171.00 | Rp. 1.543.852.828.00 | 100% | Efektif |
| 17 | Palung Raya | 2021 | Rp. 1.516.784.868.00 | Rp. 1.516.784.868.00 | 100% | Efektif |
| | | 2022 | Rp. 1.330.765.892.00 | Rp. 1.315.392.726.00 | 99% | Efektif |
| | | 2023 | Rp. 1.646.474.811.00 | Rp. 1.645.349.547.00 | 100% | Efektif |

Sumber : Data diolah oleh penulis tahun 2025

Data pada Tabel 4.6 menunjukkan kinerja efektivitas pengelolaan pendapatan anggaran dari pemerintahan desa di Kecamatan Tambang selama periode 2021 hingga 2023. Secara keseluruhan, semua desa menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mencapai target pendapatan, dengan mayoritas desa dikategorikan "Efektif" dan bahkan beberapa "Sangat Efektif". Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep *Value for Money*.

Pada tahun 2021, sebagian besar desa, termasuk Kuapan, Gobah, Teluk Kenidai, Aur Sati, Padang Luas, Kualu, Rimbo Panjang, Parit Baru, Kemang Indah, Kualu Nemas, Tarai Bangun, Sungai Pinang, Balam Jaya, Pulau Permai, dan Palung Raya, berhasil mencapai 100% realisasi pendapatan, yang menunjukkan efektivitas penuh dalam mengumpulkan pendapatan sesuai target. Desa Terantang dan Tambang juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan persentase realisasi 98% dan 95% masing-masing, yang masih tergolong "Efektif".

Memasuki tahun 2022, kinerja efektivitas tetap tinggi. Meskipun beberapa desa seperti Rimbo Panjang (92%), Kualu (95%), Tarai Bangun (96%), dan Sungai Pinang (95%) mengalami sedikit penurunan persentase realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, mereka tetap berada dalam kategori "Efektif". Ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi, pemerintah desa

secara konsisten mampu merealisasikan sebagian besar target pendapatannya.

Pada tahun 2023, Desa Gobah dan Rimbo Panjang menunjukkan peningkatan efektivitas yang luar biasa, mencapai 101% dan 102% realisasi pendapatan, masing-masing dikategorikan sebagai "Sangat Efektif". Ini berarti mereka tidak hanya mencapai target, tetapi bahkan melampauinya. Mayoritas desa lainnya juga kembali mencapai 100% realisasi pendapatan pada tahun ini, menegaskan komitmen dan kemampuan mereka dalam pengelolaan pendapatan.

PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Berdasarkan Rasio Ekonomis

Sebagian besar desa di Kecamatan Tambang menunjukkan kinerja "Ekonomis" atau "Cukup Ekonomis" dalam pengelolaan anggaran belanja selama periode 2021-2023. Rasio ekonomis yang tinggi (mendekati atau mencapai 100%) menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu merealisasikan belanja mendekati atau di bawah anggaran yang ditetapkan. Ini sejalan dengan definisi ekonomi dalam *Value for Money* yang berfokus pada perolehan input dengan biaya terendah (*spending less*) (Mardiasmo, 2018). Namun, beberapa desa seperti Teluk Kenidai, Tambang, Parit Baru, dan Pulau Permai menunjukkan rasio "Cukup Ekonomis" (84%-89%) pada tahun 2021.

Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Berdasarkan Rasio Efektivitas

Analisis rasio efektivitas (Tabel 4.6) menunjukkan bahwa kinerja pendapatan desa di Kecamatan Tambang sangat baik, dengan mayoritas desa mencapai kategori "Efektif" dan bahkan "Sangat Efektif" (di atas 100%) pada beberapa tahun. Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai (Mardiasmo, 2018). Dalam hal ini, tingginya persentase realisasi pendapatan terhadap anggaran menunjukkan keberhasilan

pemerintah desa dalam mengumpulkan sumber daya finansial yang direncanakan.

Desa Gobah dan Rimbo Panjang, yang mencapai "Sangat Efektif" pada tahun 2023, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi pendapatan, bahkan melebihi target. Ini mencerminkan perencanaan pendapatan yang solid atau adanya sumber pendapatan tak terduga yang berhasil direalisasikan.

Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Berdasarkan Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi menunjukkan bahwa ini adalah area yang paling menantang bagi pemerintahan desa di Kecamatan Tambang. Efisiensi mengukur hubungan antara input dan output, yaitu seberapa baik sumber daya digunakan untuk mencapai hasil (*spending well*) (Mardiasmo, 2018). Banyak desa tergolong "Kurang Efisien" atau "Tidak Efisien" (rasio di atas 100%) pada beberapa tahun. Rasio efisiensi di atas 100% berarti realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan, yang mengindikasikan adanya defisit atau penggunaan dana dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk menutupi belanja.

Contohnya, Desa Terantang, Gobah, Padang Luas, Rimbo Panjang, Kualu Nenas, dan Tarai Bangun menunjukkan rasio efisiensi di atas 100% pada tahun 2021 dan/atau 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun mereka mungkin ekonomis dalam arti tidak melebihi anggaran belanja yang ditetapkan (seperti yang terlihat pada rasio ekonomis), mereka tidak efisien dalam mengelola hubungan antara pendapatan yang berhasil direalisasikan dengan belanja yang dikeluarkan. Artinya, dana yang masuk tidak sepenuhnya mencukupi pengeluaran, atau ada ketidakseimbangan antara penerimaan dan penggunaan dana.

Kendala Pemerintahan Desa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam Penerapan Konsep *Value for Money*

Pandemi menyebabkan pembatalan

atau penundaan kegiatan yang sudah dianggarkan, sehingga realisasi belanja menjadi lebih rendah dari anggaran (mempengaruhi ekonomis) atau tidak seimbang dengan pendapatan (mempengaruhi efisiensi). Perubahan regulasi mendadak juga dapat mengganggu perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pekerjaan atau program yang belum selesai pada akhir tahun anggaran menyebabkan dana tidak dapat dibayarkan, menciptakan selisih antara anggaran dan realisasi. Selain itu, penurunan realisasi pendapatan (seperti yang terjadi di beberapa desa pada tahun 2022) secara langsung berdampak pada ketersediaan dana untuk belanja, sehingga rasio efisiensi menjadi buruk jika belanja tetap tinggi.

Langkah-langkah Pemerintahan Desa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk Mengatasi Kendala dalam Penerapan Konsep *Value for Money*

Pemerintah desa telah menunjukkan upaya adaptasi, seperti terlihat pada pemulihan realisasi pendapatan Desa Rimbo Panjang di tahun 2023 setelah penurunan di tahun 2022. Namun, untuk mengatasi akar masalah inefisiensi yang seringkali muncul dari ketidaksesuaian antara proyeksi pendapatan dan realisasi belanja, perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus diperkuat agar lebih realistis dan adaptif.

Ini berarti menyusun proyeksi pendapatan yang lebih cermat, mempertimbangkan potensi fluktuasi dana transfer dan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta mengalokasikan belanja dengan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian cepat terhadap kondisi tak terduga, seperti pandemi atau perubahan regulasi.

SIMPULAN

Pada aspek ekonomis, sebagian besar desa di Kecamatan Tambang menunjukkan kinerja ekonomis yang baik, dengan rasio realisasi belanja yang mendekati atau di bawah anggaran yang ditetapkan (rata-rata

di atas 90%). Hal ini mengindikasikan upaya pemerintah desa untuk memperoleh input dengan biaya yang efisien atau melakukan penghematan (*spending less*). Namun, beberapa desa masih berada dalam kategori "Cukup Ekonomis" pada tahun tertentu, menunjukkan adanya ruang untuk optimalisasi pengeluaran lebih lanjut atau adanya kegiatan yang tidak terealisasi sepenuhnya.

Pada aspek efisiensi, Kinerja efisiensi pengelolaan anggaran di Kecamatan Tambang menunjukkan tantangan yang signifikan. Banyak desa tergolong "Kurang Efisien" atau bahkan "Tidak Efisien" (rasio realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan seringkali di atas 100%). Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja seringkali melebihi realisasi pendapatan yang berhasil dikumpulkan, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara dana yang masuk dan pengeluaran, atau penggunaan dana dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk menutupi belanja.

Secara efektivitas, kinerja efektivitas pengelolaan pendapatan desa di Kecamatan Tambang secara keseluruhan sangat baik. Mayoritas desa berhasil mencapai atau bahkan melampaui target pendapatan yang ditetapkan (rata-rata di atas 95%, dengan beberapa desa mencapai "Sangat Efektif" di atas 100%).

Kendala dalam Penerapan Konsep *Value for Money* yaitu meliputi faktor eksternal dan internal. Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintahan desa di Kecamatan Tambang telah menunjukkan upaya adaptasi terhadap kondisi eksternal dan fokus pada pencapaian target pendapatan. Untuk mengatasi kendala efisiensi dan meningkatkan penerapan *Value for Money* secara holistik.

DAFTAR RUJUKAN

Aldi, M., Taufik, T., & Aunnurrafiq, A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi*

- Manajemen Bisnis Dan Teknologi (Ambitek)*, 4(1), 31–41.
<https://doi.org/10.56870/Ambitek.V4i1.103>
- Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 426–437.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2022 Dan 2023. *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2022 Dan 2023 Financial Statistics Of Village Government 2022 Dan 2023, Volume 43*, 741.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2024). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Riau 2022 Dan 2023*. 6.
- Cahyani, C. N., Sari, D. K., & Dewi, M. W. (2024). Analisis *Value for Money* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pt. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 2024, P.1-8 Analisis, 24(02), 1–8.
- Creswell. (2018). *Designing And Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publications.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory: *Australian Journal Of Management*, 16(June 1991), 49–66.
<http://aum.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/031289629101600103>
- Fitria, E., Astriani, D., & Rachpriliani, A. (2024). Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang). *Journal Of Economic, Business And Accounting Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 E-Issn: 2597-5234, 7, 11382–11392. File:///C:/Users/User/Downloads/11698-Article_Text-107211-2-10-20240930.Pdf*
- Hardiansyah, T. (2024). Analisis *Value for Money* Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Sleman Periode 2018-2021 Disusun. *Skripsi*, 15(1), 37–48.
- Hidayah, S. A. L., Ahyaruddin, M., & Fitriana, N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(4), 835.
<https://doi.org/10.35145/Bilancia.V7i4.2477>
- Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, Devika Ananda, Nugroho, Faris Ady, & Falufi, R. (2021). Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa. *Jakarta: Ditjen Bina Pemerintah Desa*, 1–59.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (Ed.); Terbaru). Andi Offset.
- Romadhan, S., Siboro, S. F., Nuraliza, S., Putri, K., & Hia, W. V. (2024b). *Aeppg: Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global Vol Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Value Money Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020-2022. I(3)*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Sugiyono (Ed.); 27th Ed.). Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (V. W. Sujarweni (Ed.); 1st Ed.). Pustaka Baru Press.